

PENGARUH KETEPATAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN MANAJERIAL SEKTOR PUBLIK PADA AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

Made Astari Pradnya Dewi¹
Ni Luh Supadmi²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: astaripradnya66@gmail.com/ telp: +62 87 8600 26109

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja pihak yang berkepentingan seperti pemerintah daerah dan masyarakat luas. Hal ini berdampak pada elemen pendukung untuk akuntabilitas kinerja. Pengujian penelitian untuk mengetahui pengaruh ketepatan anggaran serta pengendalian manajerial sektor publik pada akuntabilitas kinerja. Penelitian dilakukan pada SKPD Kota Denpasar yang berjumlah 33 SKPD dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jumlah sampel yang diambil merupakan keseluruhan SKPD yang berjumlah 33 SKPD dengan metode total sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah regresi berganda. Ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan pada akuntabilitas kinerja. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik, maka semakin baik akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: ketepatan anggaran, pengendalian manajerial, akuntabilitas kinerja

ABSTRACT

Accountability performance is a performance accountability to various stakeholders such as local government and the wider community. This has an impact on the support elements for performance accountability. The purpose of this study was to examine the influence of the accuracy of the budget and managerial control of the accountability of public sector performance. This research was conducted in the city of Denpasar SKPD of 33 SKPD with the method of data collection used the questionnaire technique. The number of samples taken an overall total of 33 SKPD SKPD the total sample method. Technique multiple linear regression analysis used in study. The results show the accuracy of the budget and managerial control of the public sector is a significant positive effect on performance accountability. This proves that the better the accuracy of the budget and managerial control of the public sector, the better accountability of local government performance.

Keywords: accuracy of the budget, managerial control, accountability performance

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik memiliki kaitan erat dengan pemerintahan daerah seperti orientasi pelayanan serta kepentingan masyarakat yang lebih transparan dan memiliki kualitas ke depan semakin baik. Hal ini merupakan bagian dari penugasan secara terstruktur dari masing-masing wewenang yang telah dimiliki. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah agar mampu mengelola sendiri daerahnya sesuai dengan kemampuan atau potensi daerah masing-masing. Masyarakat kini memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menilai bagaimana kinerja yang terjadi pada pemerintahan.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah pada umumnya terjadi pada ketidakefektifan, inefisiensi, dan penggunaan dana untuk kepentingan individu (*private inurement*) (Andarias, 2009). Hal ini disebabkan oleh mekanisme dasar pertanggungjawaban baku yang tidak dimiliki oleh pemerintahan daerah layaknya organisasi bisnis. Perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan sangat tergantung pada pengelolaan keuangan atau anggaran yang digunakan untuk pengoperasian, belanja, dan aktivitas lainnya yang digunakan negara.

Anggaran sektor publik dapat menjadi perhatian masyarakat dengan jalan informasi dan distribusi. Secara umum, ketepatan anggaran berkaitan dengan sasaran dari setiap kegiatan agar tercapai target anggaran (McPhee, 2008). Hal ini didukung dengan pendapat Mulyadi (2001:489) yang menyatakan salah satu karakteristik anggaran, menganalisis dan menjelaskan kinerja keuangan anggaran serta selisihnya. Adanya tuntutan masyarakat agar dana yang efektif dan efisien

serta adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 93 PMK.02/2011 yang menyebutkan mengenai (PBK) Penganggaran Berbasis Kinerja. Aparatur pemerintahan daerah dalam hal ini memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan dengan tepat sehingga penyusunan anggaran pada periode selanjutnya dapat tercapai dengan baik pada instansi pemerintah.

Untuk dapat merealisasikan hal ini, pemerintah dapat melakukan pengendalian dalam setiap proses pelaksanaannya. Pengendalian manajerial yang terdapat pada sektor publik dapat menjadi suatu alat untuk mempercepat dalam ketepatan hasil yang diinginkan pemerintah. Fokus pengendalian organisasi sektor publik adalah dengan keberhasilan pelaksanaan strategi yang digunakan secara efektif dan efisien. Proses kendali manajemen menurut Anthony dan Govindarajan (2008:19) adalah keseluruhan manajer memperhatikan para bawahannya untuk melaksanakan strategi yang direncanakan.

Anjarwati (2012) dalam penelitiannya tentang anggaran, pelaporan dan pengendalian akuntansi memperoleh hasil yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Tresnawati (2012) mengenai pengendalian internal terhadap kinerja pemerintahan Kota Bandung berada dalam interval baik dengan hasil positif. Pembangunan Kota Denpasar merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Propinsi Bali serta pembangunan nasional. Isu-isu strategis yang berkembang dalam pembangunan daerah dapat terjadi akibat kurangnya optimalisasi kekuatan daerah, antisipasi kelemahan, kurangnya peluang yang dimanfaatkan, dan antisipasi ancaman yang datang untuk masing-masing dinas dengan permasalahan setiap sektornya. Hal ini yang

membuat penelitian ini dilakukan pada keseluruhan SKPD Kota Denpasar dengan jumlah 33 SKPD untuk peninjauan lebih lanjut mengenai ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja SKPD dengan hipotesis penelitian seperti:

H₁: Ketepatan anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja SKPD Kota Denpasar.

H₂: Pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja SKPD Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Kota Denpasar dengan sasaran penelitian pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di Kota Denpasar. Data kuantitatif yang digunakan adalah berasal dari data kualitatif yang dikuantitatifkan, yaitu jawaban kuesioner yang diukur menggunakan skala Likert.

Populasi yang digunakan adalah keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Denpasar yaitu sebanyak 33 SKPD. Metode penentuan sampel menggunakan pendekatan keseluruhan sampel yaitu peneliti menjadikan keseluruhan SKPD Kota Denpasar sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan responden, yaitu Kepala, Direktur atau sejajar dengan Kepala Dinas pada pemerintahan daerah serta tiga kepala Seksi/Bagian/Subbagian di masing-masing pemerintahan SKPD sebagai responden yang dianggap mampu untuk menggambarkan keseluruhan kinerja instansi pemerintah daerah.

Metode survei yang digunakan adalah dengan menyebar kuesioner. Responden mengisi secara langsung kuesioner tersebut berupa pertanyaan dan pernyataan tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data statistik deskriptif tertera dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

No.	Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
1.	Ketepatan Anggaran	33	12	24	18,73	3,00
2.	Pengendalian Manajerial Sektor Publik	33	21	38	29,54	3,67
3.	Akuntabilitas Kinerja	33	23	39	32,06	3,24

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Variabel ketepatan anggaran (X_1) memiliki nilai antara 12-24 dengan nilai mean sebesar 18,73 apabila dibagi dengan 6 pernyataan menghasilkan nilai 3,12. Hasil ini memberikan arti, yaitu responden memberikan skor 3 untuk setiap pernyataan variabel ketepatan anggaran.

Pengendalian manajerial sektor publik (X_2) memiliki skor berkisar 21-38 sehingga diperoleh skor rata-rata 29,54 apabila dibagi dengan jumlah pernyataan yaitu sebanyak 10 pernyataan, maka akan menghasilkan nilai 2,95 yang artinya rata-rata responden memberikan penilaian pada skor 2 dan 3 untuk setiap pernyataan pengendalian manajerial sektor publik.

Akuntabilitas kinerja (Y) memiliki skor berkisar 23-39 sehingga diperoleh skor rata-rata 32,06 apabila dibagi dengan jumlah pernyataan yaitu sebanyak 10 pernyataan, maka akan menghasilkan nilai 3.20 yang artinya rata-rata responden memberikan penilaian pada skor 3 untuk setiap pernyataan akuntabilitas kinerja.

Hasil uji validitas antara korelasi skor faktor dengan skor total positif memiliki nilai di atas 0,3 maka dapat dikatakan memiliki konstruk yang kuat dalam hal validitas instrumen yang dapat digunakan. Hasil pengujian validitas menunjukkan instrumen yang digunakan dalam penelitian yang terdiri atas ketepatan anggaran (X_1) dan pengendalian manajerial sektor publik (X_2) serta akuntabilitas kinerja (Y) memiliki (*Pearson Correlation*) berada pada kisaran angka 0,3 keatas dan positif. Ini berarti keseluruhan butir pernyataan dalam kuisisioner tersebut dapat dikatakan valid dengan hasil validitas yang terlihat pada Tabel 2.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* di masing-masing variabel lebih besar dari 0,60 yang artinya seluruh pernyataan dalam kuesioner penelitian ini reliabel dan dapat digunakan. Uji reliabilitas instrumen tertera pada Tabel 3. Uji normalitas memiliki hasil siginifikansi sebesar ($0,200 > 0.05$) pada Tabel 4. Hasil ini dapat memberikan penjelasan bahwa data terdistribusi atau menyebar secara normal. Uji reliabilitas instrumen tertera pada Tabel 4.

Nilai sig. pada uji heteroskedastisitas menunjukkan masing-masing variabel adalah $> 0,05$. Hasil ini membuktikan seluruh variabel tersebut dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas dan tidak terdapatnya pola yang membentuk secara jelas pada grafik *Scatter Plot*.

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Kode Instrumen	Koefisien Korelasi	Keterangan
1.	Ketepatan Anggaran (X ₁)	X2.1	0,694	Valid
		X2.2	0,654	Valid
		X2.3	0,776	Valid
		X2.4	0,527	Valid
		X2.5	0,727	Valid
		X2.6	0,704	Valid
2.	Pengendalian Manajerial Sektor Publik (X ₂)	X3.1	0,597	Valid
		X3.2	0,638	Valid
		X3.3	0,511	Valid
		X3.4	0,517	Valid
		X3.5	0,473	Valid
		X3.6	0,529	Valid
		X3.7	0,45	Valid
		X3.8	0,458	Valid
		X3.9	0,557	Valid
		X3.10	0,538	Valid
3.	Akuntabilitas Kinerja (Y)	Y.1	0,655	Valid
		Y.2	0,485	Valid
		Y.3	0,502	Valid
		Y.4	0,609	Valid
		Y.5	0,59	Valid
		Y.6	0,506	Valid
		Y.7	0,476	Valid
		Y.8	0,622	Valid
		Y.9	0,632	Valid
		Y.10	0,512	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Uji reliabilitas instrumen tertera pada Tabel 3 seperti:

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Ketepatan Anggaran (X ₁)	0,768	Reliabel
2.	Pengendalian Manajerial Sektor Publik (X ₂)	0,709	Reliabel
3.	Akuntabilitas Kinerja (Y)	0,753	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Hasil uji normalitas SKPD Kota Denpasar terlihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
N	33
Kolmogorov-Smirnov Z	0,094
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,2

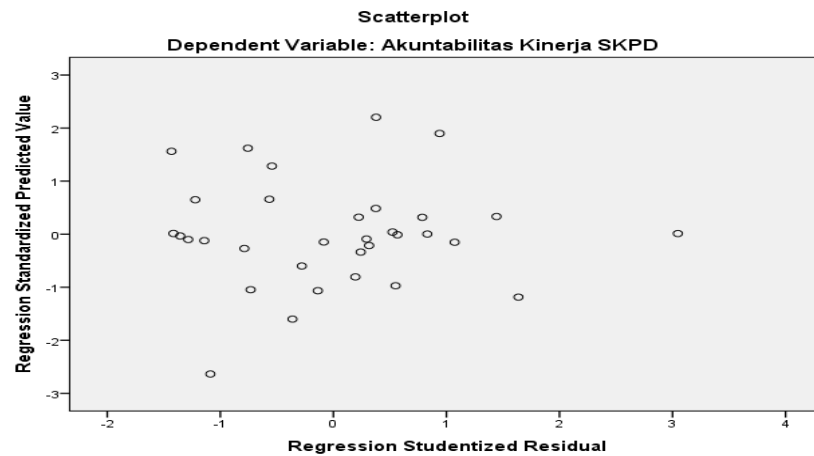
Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat disajikan pada Tabel 5 seperti.

Tabel 5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

No.	Variabel	Sig.	Keterangan
1.	Ketepatan Anggaran (X ₁)	0,310	Bebas Heteroskedastisitas
2.	Pengendalian Manajerial Sektor Publik (X ₂)	0,531	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2014



Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinearitas jika tingkat korelasi $> 95\%$, nilai *Tolerance* < 0.10 atau nilai *VIF* > 10 . Hasil uji multikolinearitas penelitian ini terlihat pada Tabel 6 seperti berikut.

Tabel 6.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Ketepatan Anggaran (X_1)	0,503	1,989
Pengendalian Manajerial Sektor Publik (X_2)	0,550	1,820

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Tabel 6 menunjukkan bahwa ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik mempunyai hasil *VIF* dan *Tolerance* di bawah 10 dan di atas 0,10. Hasil ini membuktikan tidak adanya multikolinieritas antara variabel-variabel yang diteliti. Hasil nilai uji secara statistik dalam daerah kritis dapat disebut telah signifikan. Uji analisis regresi berganda terlihat berikut ini:

Tabel 7.
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda terhadap Variabel Independen

No.	Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	0,938	2,585		0,363	0,719
1.	Ketepatan Anggaran (X ₁)	0,375	0,146	0,3	2,574	0,015
2.	Pengendalian Manajerial Sektor Publik (X ₂)	0,293	0,11	0,297	2,668	0,012

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 7, persamaan regresi linear berganda dan variabel-variabel yang diuji disajikan seperti:

$$Y = 0,938 + 0,431X_1 + 0,3757X_2 + 0,293 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan pengaruh variabel-variabel pada akuntabilitas kinerja, yakni:

- 1) Konstanta sebesar 0,938 memberikan arti jika nilai variabel bebas yaitu, ketepatan anggaran (X₁) dan pengendalian manajerial sektor publik (X₂) sama dengan nol, maka akuntabilitas kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,938.
- 2) Nilai koefisien ketepatan anggaran (X₁) sebesar 0,375 menunjukkan dimana setiap peningkatan ketepatan anggaran sebanyak satu peningkatan, maka akuntabilitas kinerja (Y) meningkat bernilai 0,375 satuan dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.
- 3) Nilai koefisien pengendalian manajerial sektor publik (X₂) sebesar 0,293 menunjukkan dimana setiap peningkatan pengendalian manajerial sektor publik sebanyak satu peningkatan, maka peningkatan akuntabilitas kinerja

(Y) meningkat senilai 0,293 satuan dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol. Hasil *adjusted R square* disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8.
Hasil *Adjusted R²*

Model	R	R Square	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,896 ^a	0,802	0,782	2,175013

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Hasil *Adjusted R square* menggambarkan sebesar 0,782. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas kinerja SKPD sebesar 78,2 persen sedangkan 21,8 persen ditentukan oleh faktor lainnya.

Uji F, *P Value* menunjukkan $\alpha < 0,05$, sehingga model yang digunakan layak. Hasil analisis kelayakan model (F) ini disajikan di Tabel 9 berikut.

Tabel 9.
Hasil Uji F

Model	<i>Sum of Squares</i>	Df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
Regression	556,264	3	185,421	39,195	0,000 ^b
Residual	137,190	29	4,731		
Total	693,454	32			

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Hasil analisis data menunjukkan hasil angka F adalah 39,195 pada tingkat sig. sebesar 0,000. Hasil signifikansi menunjukkan H_0 ditolak. Artinya, ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kota Denpasar.

Variabel ketepatan anggaran (X_1) menunjukkan t hitung 2,574 serta sig adalah 0,015. Artinya, nilai $0,000 < \alpha 0,05$. Variabel ketepatan anggaran (X_1) memiliki koefisien β bernilai positif sebesar 0,375. Hal ini membuktikan bahwa dalam penelitian ini ketepatan anggaran (X_1) memiliki pengaruh signifikan dan positif pada akuntabilitas kinerja SKPD sehingga dugaan atau hipotesis pertama dapat diterima.

Variabel pengendalian manajerial sektor publik (X_2) memiliki t hitung sebesar 2,688 serta nilai sig. 0,012. Berarti, bahwa nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel pengendalian manajerial sektor publik (X_2) bernilai positif yaitu 0,293. Hal ini membuktikan bahwa dalam penelitian ini pengendalian manajerial sektor publik (X_2) berpengaruh signifikan dan positif pada akuntabilitas kinerja SKPD sehingga hipotesis kedua dapat diterima.

Hal ini juga selaras dengan penelitian Annisa (2013), Anjarwati (2012) serta Darma (2004) yang meneliti tentang anggaran serta pengendalian akuntansi mengenai kinerja manajerial mendapatkan hasil yang positif signifikan. Banyak interaksi informal terjadi antara manajer dengan manajer atau manajer dengan bawahannya. Hal ini menjadi bagian dalam suatu sistem perencanaan dan pengendalian formal. Sistem pengendalian manajerial sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja SKPD dalam penelitian ini memiliki hasil yang searah dengan penelitian sebelumnya oleh Tresnawati (2012) mengenai pengendalian internal pada kinerja pemerintahan Kota Bandung berada dalam interval baik dengan hasil positif, serta penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2011) serta

Febriati (2011) dengan hasil yang diperoleh baik positif signifikan dalam mempengaruhi akuntabilitas kinerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Ketepatan anggaran berpengaruh positif signifikan pada akuntabilitas kinerja SKPD. Peningkatan ketepatan anggaran dalam perencanaan, evaluasi dan tindakan terhadap setiap kegiatan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD Kota Denpasar. Pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh dan positif signifikan pada akuntabilitas kinerja SKPD. Peningkatan pencapaian kendali manajerial pada setiap bagian yang terdapat di setiap dinas dan badan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD Kota Denpasar.

Peneliti berikutnya sebaiknya meneliti seluruh kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Bali, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi. Pengkomunikasian dalam pengendalian manajerial kinerja merupakan hal penting dalam sistem internal, seperti komunikasi antara atasan dengan bawahan, karena dengan komunikasi dan sistem yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja di setiap pemerintahan daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel selain ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik, seperti variabel komunikasi internal yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja SKPD melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

REFERENSI

Anjarwati, Mei. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Anthoni, dkk. 2008. Sistem Pengendalian Manajemen, diterjemahkan oleh Kurniawan. Star Gate. Jakarta.
- Bangun, Andarias. 2009. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). *Tesis* (Sekolah PascaSarjana Universitas Sumatera Utara, Medan).
- Darma, E. S. 2004. Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten. Dan Kota SePropinsi Daerah Istimewa Jogjakarta). *Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar Bali*
- Febriati. 2011. Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Vol 7*. Universitas Singkawang. Kalimantan.
- McPhee, Ian. 2008. Developing and Managing Internal Budgets. Australian National Audit Office: Canberra Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Mulyadi. 2001. Akuntansi manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Padang. *Jurnal Akuntansi* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Pratiwy Suwandi, Annisa. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 93/PMK.02 Tahun 2011. tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Tresnawati, Rina. 2012. Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Prosiding Seminar Nasional, Forum Bisnis & Keuangan I. Universitas Widyatama
- Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah se-Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.